

## DAFTAR PUSTAKA

- Rianda Prayoga, 2018, *Siapa yang Menemukan Narkoba Pertama Kali ?* Dikutip dari <https://medium.com/@riandaprayoga/siapa-yang-menemukan-narkoba-pertama-kali-e8bcabff5b3a>
- Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus Napitupulu, Anggara, *Implementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya*, Institute for Criminal Justice Reform, 2016, Dikutip dari <http://www.tribunnews.com/tribunners/2012/05/12/sejarahnarkoba-dan-pemberantasannya-di-indonesia>
- Rido Triawan, S.H, *Membongkar Kebijakan Narkotika*, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia & Kemitraan Australia-Indonesia, Jakarta, 2010.
- Institute For Criminal Justice Reform, 2017, Dikutip dari <https://icjr.or.id/hakim-diminta-untuk-memberikan-putusan-rehabilitasi-kepada-pengguna-dan-pecandu-narkotika-sesuai-sema-42010/>
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Narkotika Nasional, Dikutip pada dari <https://icjr.or.id/hakim-diminta-untuk-memberikan-putusan-rehabilitasi-kepada-pengguna-dan-pecandu-narkotika-sesuai-sema-42010/>
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Djoko Prakoso, *Kejahatan Kejahatan yang membahayakan dan Merugikan Negara*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Soedjono D, *Narkotika dan remaja*, Bandung : Alumni, 1983.
- Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung : Karya Nusantara, 1977.

Badan Narkotika Nasional, Dikutip dari <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaan-Narkotika> Glenn Greenwald, *Drug Decriminalization in Portugal; Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies*, USA:Cato Institute, 2009.

Badan Narkotika Nasional, 2013, Dikutip dari <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaan-Narkotika>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.

Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung : Sinar Baru, 1983.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 1997.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 2015.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung:Unila, 2009.

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Abdullah, Mustafa dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983.

Indrarini Listyowati, 2008, *Analisis efektifitas proses internal pelayanan rehabilitasi medis pada unit pelaksana teknis badan Narkotika nasional*, Jakarta : Universitas Indonesia, Dikutip dari

<http://www.lib.ui.ac.id/detail?id=120579&lokasi=lokal#parentHorizontalTab2>

Tumbur Palti D. Hutapea, *Penerapan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Prajurit TNI dalam Putusan Pengadilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 1, 2018

Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, *Kebijakan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan Narkotika pada undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Bali : Magister Hukum Universitas Udayana, Vol. 2, No. 1, 2013

Syahrudin Nawawi, *Penelitian Hukum Normative Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 2017.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.

L.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Soerjono Soekanto, *Suatu Pengantar Sosiologi*, Bandung : Rajawali Press, 1996.

John Locke, *Kuasa itu Milik Rakyat: Esai mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*, terj. A. Widyamartaya, Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern*, Yogyakarta: Kanisius, 2004.

- Alwino, Alfensius. *Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan Dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, Dan Justice As Fairness Rawls*, Jakarta:Kwik Kian Gie School Of Business, 2016.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Cet. 1 Bandung:Penerbit Alumni, 1994.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cet.1 Malang:Bayumedia Publishing, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.2, Jakarta : Kencana, 2008.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Salemba Humanika, 2011.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.
- David Jary and Julia Jary, *Dictionary of Sociology*, Glasgow:Harper Collins Publishers, 1991.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.
- Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana PrennamdeiaGroup, 2013.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992

Adi Purnomo, *Fasilitas Pertukaran Budaya Indonesia -Jepang*, Yogyakarta : UGM, 1995

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang mengubahnya, Lembaran Negara Nomor 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085.

Undang – undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, 1976, Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 37.

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan *Convention On Psychotropic Substances 1971*, Lembaran Negara Nomor 1996 Nomor 100.

Undang – undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*, 1988, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 17.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika,

Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 923 Tahun 2017.

Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465.